



TECH FOR  
GOOD  
INSTITUTE



Laporan – Januari 2026

## Platform Digital untuk Kepentingan Publik: Dari Digitalisasi hingga Tata Kelola Berbasis Platform



# Daftar Isi

<b>Latar Belakang Inisiatif dan Ucapan Terima Kasih</b>	<b>05</b>
Inisiatif Penelitian	05
Metodologi Penelitian	05
Ucapan Terima Kasih kepada Kontributor	06
Mitra Penyelenggara	08
Pernyataan Pendanaan	08
Penafian	08
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>09</b>
<b>Bab I: Dari Digitalisasi hingga Tata Kelola Berbasis Platform</b>	<b>11</b>
1.1 Pendahuluan	11
1.2 Definisi dan Metodologi Penelitian	14
1.3 Mengapa Bermitra dengan Platform Komersial	14
1.3.1 Ketangkasan Operasional dan Skala Regional	15
1.3.2 Menciptakan Visibilitas pada Kegiatan Ekonomi yang Sebelumnya Tidak Terukur	16
1.3.3 Data Terkini dan Kebijakan Berbasis Bukti	17
1.4 Catatan Penting Bab 1	18
<b>Bab 2: Model Kolaborasi Pemerintah dan Platform</b>	<b>19</b>
2.1 Model 1: Integrasi Layanan	20
2.1.1 Integrasi Penyediaan Layanan Pemerintah	20
2.1.2 Integrasi Infrastruktur Keuangan	23

---

2.2 Model 2: Pembangunan Kapasitas	27
2.3 Model 3: Dukungan Kebijakan Berbasis Data	30
2.4 Catatan Penting Bab 2	33
<b>Bab 3: Kendala dan Hambatan</b>	<b>34</b>
3.1 Lapisan 1: Hambatan Kesiapan	35
3.1.1 Kesiapan Infrastruktur: Ketimpangan dan Kesenjangan Digital	35
3.1.2 Kesiapan Masyarakat: Kesenjangan Literasi dan Kapabilitas Digital	35
3.1.3 Kesiapan Kelembagaan: Kapasitas, Sumber Daya, dan Keberlanjutan Keuangan	36
3.2 Lapisan 2: Hambatan Operasional dan Tata Kelola	37
3.2.1 Fragmentasi Layanan dan Hambatan Koordinasi	37
3.2.2 Tantangan Tata Kelola Data	38
3.2.3 Kerentanan Keamanan Siber dan Penanganan Data	39
3.3 Lapisan 3: Kepercayaan dan Ketergantungan	41
3.3.1 Membangun dan Menjaga Kepercayaan	41
3.3.2 Memitigasi Risiko Sistemik dan Ketergantungan	41
3.4 Catatan Penting Bab 3	42
<b>Bab 4: Rekomendasi</b>	<b>43</b>
4.1 Prinsip Kemitraan Platform dan Pemerintah yang Efektif	43
4.2 Pilar Operasional untuk Manajemen Kemitraan yang Efektif	44
4.2.1 Menyiapkan Struktur Tata Kelola yang Efektif	44
4.2.2 Kerangka Pertukaran Data dan Perlindungan Privasi	46
4.2.3 Mengelola Ekspektasi Pemangku Kepentingan dan Mengomunikasikan Capaian	47

---

---

4.3 Peran Industri dan Asosiasi Bisnis sebagai Orkestrator Ekosistem	48
4.4 Peta Jalan Kolaborasi Platform dan Pemerintah	50
Tahap 1: Landasan Dasar dan Penilaian	51
Tahap 2: Uji Coba	54
Tahap 3: Formalisasi dan Perluasan Skala	55
Tahap 4: Keberlanjutan dan Perkembangan	57
4.5 Catatan Penting Bab 4	58
<b>Referensi</b>	<b>59</b>

---

# Latar Belakang Inisiatif dan Ucapan Terima Kasih

## Inisiatif Penelitian

Laporan ini, "*Dari Digitalisasi hingga Tata Kelola Berbasis Platform: Memperkuat Implementasi Kebijakan Melalui Inovasi Berbasis Platform*," merupakan hasil dari kolaborasi riset mendalam yang dilakukan oleh Tech for Good Institute (TFGI) di seluruh Asia Tenggara. Inisiatif penelitian ini mempelajari bagaimana kemitraan antara platform digital komersial dan instansi pemerintah dapat memperkuat implementasi kebijakan dan mewujudkan kepentingan publik di seluruh kawasan.

## Metodologi Penelitian

Penelitian untuk laporan ini dilakukan dalam kurun waktu beberapa bulan melalui proses sebagai berikut:

- **Tinjauan pustaka mendalam:** Analisis komprehensif terhadap riset akademik, dokumen kebijakan, laporan industri, dan publikasi pemerintah yang mencakup periode beberapa bulan.
- **Konsultasi Multi Pihak:** Diskusi meja bundar (*roundtables*) di Malaysia (November 2025) dan Indonesia (Agustus 2025) serta pertemuan meja bundar virtual di Filipina (Juli 2025), dengan melibatkan langsung lebih dari 40 perwakilan senior dari badan pemerintah, badan pengatur, platform digital, asosiasi industri, institusi akademik, *lembaga pemikir*, dan organisasi masyarakat sipil.

## Ucapan Terima Kasih kepada Kontributor

Tech for Good Institute ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada lebih dari 40 peserta terhormat yang telah bersedia menyumbangkan waktu, keahlian, dan wawasannya untuk inisiatif penelitian ini. Para pemangku kepentingan berikut mewakili berbagai perspektif penting di seluruh ekosistem tata kelola digital dan wawasan mereka turut membantu membentuk pengembangan model kolaborasi, identifikasi tantangan dalam implementasi, dan perumusan peta jalan praktis yang disajikan dalam laporan ini.

### Filipina

- **Rose P. Villar**, Chief Economic Development Specialist (EDS), Innovation Staff, Department of Economy, Planning, and Development (DEPDev)
- **Cheska R. Espino**, Supervising EDS, Innovation Staff, Department of Economy, Planning, and Development (DEPDev)
- **Chelle Hennessy R. Batallones**, Economic Development Specialist I, Innovation Staff, Department of Economy, Planning, and Development (DEPDev)
- **Jeehad Januar Tanggol**, Assistant Division Chief, ICT Industry Benchmarking and Promotions Division, ICT Industry Development Bureau, Department of Information and Communications Technology (DICT)
- **Monchito Ibrahim**, Lead Convenor, Alliance of Tech Innovators for the Nation
- **Bettina Bautista**, Policy Manager, Makati Business Club
- **Edwin L. Aborque**, DTMCC
- **Mohammad Mahmoud**, Research Analyst, Philippine Institute for Development Studies (PIDS)
- **Susan Amoroso**, Editor and Publisher, On Board Publishing
- **Bruce Rodriguez**, Head of Editorial, GCash
- **Gret de Leon-Baltazar**, Head of Public Affairs Strategy, GCash

### Indonesia

- **Muhammad Faisal**, Kepala Kemitraan & Ekosistem Investasi, Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
- **Budi Primawan**, Sekretaris Jenderal, Indonesian E-Commerce Association (idEA)
- **Raisha Safira**, Public Policy and Government Relations Officer, Indonesian E-Commerce Association (idEA)
- **Dr Romora Edward Sitorus**, Penasihat Kebijakan, Asian Development Bank (ADB)

- **Hafiz Noer**, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah, Centre for Digital Society (CfDS)
- **Arryo Harman**, Head of Public Affairs Strategic Projects, Grab Indonesia
- **Kristin Budiarti**, Assistant Manager, Grab Indonesia
- **Reancy Triashri**, Business Venture Manager, DANA Indonesia
- **Toto Rianto Wahyu**, Partnership Executive, Jakarta Smart City
- **Ary Muadz**, Tenaga Ahli, Jakarta Smart City
- **Gita Sidabutar**, Partnership Lead, Jakarta Smart City
- **Nada Haroen**, Head of Product, INA Digital Edu/Gov Tech Edu
- **Keshya Diva Yohannisa**, Business Development Manager, Impactto
- **Amira Putri**, Business Development, Impactto
- **Andra Alfarisz**, Marketing Communication & Partnership Lead, Instellar
- **Excel Putra Waliliong**, Associate, Tony Blair Institute for Global Change
- **Alva Lazuardi**, Associate Consultant, APCO

## Malaysia

- **Kian Yew Ong**, Chief Executive Officer, The National Tech Association of Malaysia (PIKOM)
- **Hazim Faizi Sidek**, Head of Cross-Border Rules, Digital Trade, Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
- **Nazliyah Mohd Ali**, VP, Sector Development, MyMAHIR, TalentCorp
- **Dr Wan Khatina Nawawi**, Managing Director, EconWorks
- **Dr Andi Rossi**, Acting Head, Innovation Ecosystem, Futurise
- **Mak Kum Shi**, National Council Member, SME Association
- **Ngoh Chee Hung**, Director of Corporate Information Center, HELP University
- **Arinah Najwa Ahmad Said**, Public Affairs Director, Grab Malaysia
- **Afiq Ismaizam**, Public Affairs, Grab Malaysia
- **Tengku Azrul Tengku Azhar**, Head of Public Policy (E-Commerce), ByteDance
- **Graciely Estefanie Rodriguez O'Hara**, Executive AI Policy, NAI0
- **Esther Low**, Marketing Lead, Kabel

## Mitra Penyelenggara

Tech for Good Institute ingin memberikan apresiasi yang mendalam atas peran penting dari mitra penyelenggara kami, yang atas dukungan institusional, jaringan, serta kredibilitasnya telah memungkinkan terciptanya dialog yang bermakna antar pemangku kepentingan di seluruh kawasan:

- **Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Indonesia**, atas dukungannya dalam memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan dan memberikan pandangan pemerintah yang krusial dalam diskusi meja bundar di Indonesia
- **The National Tech Association of Malaysia (PIKOM), Malaysia**, atas dukungannya dalam menghimpun pemangku kepentingan industri dan mendorong dialog antara sektor publik dan swasta sepanjang proses konsultasi di Malaysia
- **Thailand Development Research Institute (TDRI), Thailand**, atas dukungannya dalam mendukung peluncuran publik dan diseminasi temuan riset di seluruh kawasan

Komitmen mereka dalam membangun dialog kebijakan berbasis bukti dan memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan industri memiliki peranan penting dalam keberhasilan inisiatif ini.

## Pernyataan Pendanaan

Tech for Good Institute ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada **Grab**, donor pendiri TFGI, yang telah mendukung misi TFGI dalam memanfaatkan teknologi dan ekonomi digital untuk pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Asia Tenggara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian yang berlaku dan komitmen TFGI terhadap independensi, para penyandang dana tidak menentukan temuan riset, kerangka analitis, ataupun wawasan dan rekomendasi yang tercantum dalam laporan ini. Semua kesimpulan merupakan hasil penilaian independen dari tim peneliti Tech for Good Institute.

## Penafian

Kendati laporan ini banyak merujuk pada konsultasi pemangku kepentingan serta masukan dari para ahli yang dihimpun sepanjang proses riset, seluruh analisis, interpretasi, kesimpulan, dan rekomendasi yang tercantum di dalam laporan ini merupakan hasil penelitian independen dan pertimbangan matang dari Tech for Good Institute. Keikutsertaan individu atau organisasi dalam konsultasi riset tidak dapat diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap temuan atau rekomendasi tertentu. Segala bentuk kesalahan, kelalaian, atau keterbatasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim penulis.

Semangat kolaborasi, keterbukaan, dan komitmen tulus terhadap kepentingan publik yang ditunjukkan oleh semua peserta selama proses penelitian ini menunjukkan potensi kemitraan platform dan pemerintah yang efektif. Kami sangat berharap bahwa laporan ini dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dalam memperkuat kolaborasi semacam ini di seluruh Asia Tenggara demi kesejahteraan seluruh masyarakat di kawasan ini.

# Ringkasan Eksekutif

Pemanfaatan platform digital oleh pemerintah Asia Tenggara (SEA) menunjukkan suatu perkembangan kawasan menuju arsitektur tata kelola digital yang lebih mumpuni. Laporan yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka yang mendalam dan lokakarya pemangku kepentingan di Filipina, Indonesia, dan Malaysia ini, berfokus pada kerja sama antara platform digital komersial dan badan pemerintah dalam menyediakan satu atau beberapa barang publik.

Pemerintah menghadapi tantangan dalam beberapa bidang pelaksanaan kebijakan tertentu, termasuk keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis. Tiga alasan kuat berikut mendukung kerja sama dengan platform komersial yang ada saat ini daripada membangun solusi secara mandiri: **Pertama, efisiensi biaya:** Platform telah berinvestasi secara besar-besaran pada kemampuan teknis, infrastruktur, dan talenta. Pemerintah dapat memanfaatkan investasi tersebut, sehingga mengurangi biaya implementasi secara signifikan. **Kedua, kecepatan dan skala:** Platform sudah memiliki jutaan pengguna yang terdaftar dan akrab dengan sistem serta tampilan antarmuka mereka. Hal ini memungkinkan peluncuran layanan yang lebih cepat dan jangkauan yang lebih luas. **Ketiga, capaian kebijakan yang lebih berdampak:** Platform memiliki pemahaman mendalam seputar pemangku kepentingan, termasuk kebutuhan, kekhawatiran, perilaku mereka, serta memiliki keahlian teknis mengenai solusi apa yang memungkinkan, sehingga pengetahuan dan keahlian teknis ini dapat mendukung perumusan kebijakan dan implementasi yang efektif.

Penelitian dan konsultasi kami dengan pemangku kepentingan dari berbagai negara membuahkan tiga model kemitraan utama. **Model Integrasi Layanan** menunjukkan bagaimana platform mengintegrasikan layanan terkait pemerintahan langsung di dalam aplikasi pengguna mereka. **Model Pembangunan Kapasitas** mengacu pada investasi platform dalam meningkatkan kemampuan pengguna, sehingga memungkinkan partisipasi yang berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi maupun non-ekonomi digital. **Model Dukungan Kebijakan Berbasis Data** melibatkan platform dalam penyediaan data teragregasi dan, dalam beberapa situasi, kemampuan analitis dalam membuat kebijakan berbasis bukti, didukung oleh kerangka regulasi yang menyeimbangkan aspek transparansi dan kerahasiaan komersial.

Bekerja sama dengan platform, sekaligus melayani kepentingan publik, juga menimbulkan pertanyaan kebijakan, seperti: Bagaimana kemitraan dapat diatur agar melindungi kepentingan publik dan menjaga akuntabilitas, sekaligus mendorong keberlanjutan inovasi dari platform yang kini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melayani warganya?

Oleh karena itu, kami mengusulkan prinsip dan pilar operasional berikut agar kemitraan platform dan pemerintah lebih berkelanjutan dan tangguh serta terus memberi ruang bagi platform untuk berinovasi.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- A. Tujuan Jelas.** Sasaran kebijakan yang jelas membantu platform digital komersial bekerja secara efektif bersama pemerintah.
- B. Nilai Bersama.** Membangun hubungan yang saling mendukung yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi publik.
- C. Kepercayaan Kerja.** Dibangun melalui pelibatan yang konsisten seiring waktu.

Pilar operasional untuk manajemen kemitraan yang efektif mencakup pembentukan struktur tata kelola yang efektif, pengembangan dan implementasi kerangka tata kelola data yang kuat, dan peningkatan kepercayaan publik dan akuntabilitas.

Selain itu, bekerja sama dengan Industri dan asosiasi bisnis, yang kerap berperan sebagai orkestrator ekosistem, dapat membantu memfasilitasi kolaborasi antara platform digital komersial dan badan pemerintah. Asosiasi tersebut kerap menjalankan peran sebagai mitra dialog yang tepercaya.

Terakhir, kami merangkum pemaparan di atas dengan menawarkan sebuah peta jalan kolaborasi yang terinci, praktis, dan bertahap bagi pemerintah serta platform digital komersial untuk mendukung manajemen kemitraan yang efektif. Secara keseluruhan, apabila diterapkan secara efektif, kemitraan ini tidak semata-mata mengurangi biaya pemerintah, tapi memperluas kemungkinan yang menyejahterakan warganya.